



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI X DPR RI  
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA,  
PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, RISTEK DIKTI, DAN PERPUSNAS)**

---

|                      |  |
|----------------------|--|
| Tahun Sidang         | : 2017 - 2018.   |
| Masa Persidangan ke- | : I (Satu).  |
| Sifat Rapat          | : Terbuka.   |
| Jenis Rapat          | : Rapat Dengar Pendapat.   |
| Dengan               | : <b>Kepala Perpustakaan RI.</b>   |
| Hari/Tanggal         | : <b>Selasa, 17 Oktober 2017.</b>  |
| Pukul                | : <b>14.00 s/d selesai.</b>  |
| Tempat               | : Ruang Rapat Komisi X DPR RI.   |
| Pimpinan Rapat       | : DR. Ir. Djoko Udjiyanto, M.M./Ketua Komisi X DPR RI.<br>Ir. H.A.R. Sutan Adil Hendra, M.M./Wakil Ketua<br>Komisi X DPR RI. |
| Sekretaris Rapat     | : Sarilan Putri Khairunnisa, S.Sos./Kabagset Komisi X<br>DPR RI.   |
| Acara                | : <b>Penyesuaian RKA-K/L TA 2018 Sesuai Hasil<br/>Pembahasan Badan Anggaran DPR RI.</b>                                      |
| Hadir                | : 37 orang dari 53 Anggota Komisi X DPR RI.  |
| Hadir Pemerintah     | : Muh. Syarif Bando/Kepala Perpustakaan RI beserta<br>jajarannya.  |

**I. PENDAHULUAN.**

Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 15.30 oleh DR. Ir. Djoko Udjiyanto, M.M./Ketua Komisi X DPR RI, kemudian Rapat dipimpin oleh Ir. H.A.R. Sutan Adil Hendra, M.M./Wakil Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Kepala Perpustakaan RI serta menampung pertanyaan, saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

**II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

1. Berdasarkan Pasal 98 ayat (2) huruf c UU. No. 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan berdasarkan Surat Ketua Badan Anggaran DPR RI Nomor: AG/18752/DPR RI/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 perihal penyampaian hasil pembahasan RUU tentang APBN 2018, Komisi X DPR RI menyetujui pagu alokasi anggaran belanja Perpustakaan RI pada RAPBN TA 2018 sebesar Rp 584.933.638.000,- (Lima ratus delapan puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

2. Komisi X DPR RI dan Perpustakaan RI sepakat bahwa pagu alokasi anggaran belanja Perpustakaan RI pada RAPBN TA 2018 sebesar Rp 584.933.638.000,- (Lima ratus delapan puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dialokasikan menurut unit utama dan program sbb:

(dalam rupiah)

| Unit Utama  | Program   | Alokasi Pagu RAPBN TA 2018 |
|---|---|----------------------------|
| Sekretariat Utama   | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | 175.890.919.000            |
| Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi | Pengembangan Perpustakaan                               | 150.919.800.000            |
| Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan         | Pengembangan Perpustakaan                               | 242.958.500.000            |
| UPT Perpustakaan Bung Karno                                 | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | 6.600.000.000              |
|   | Pengembangan Perpustakaan                               | 2.966.785.000              |
| UPT Perpustakaan Bung Hatta                                 | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | 3.112.087.000              |
|   | Pengembangan Perpustakaan                               | 2.485.547.000              |
| <b>Total</b>  |   | <b>584.933.638.000</b>     |

3. Dalam rangka pengawasan dan berdasarkan Pasal 227 ayat (3) UU. No. 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Komisi X DPR RI mendesak Perpustakaan RI untuk menyerahkan kepada Komisi X DPR RI terkait bahan tertulis mengenai jenis belanja dan kegiatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah UU tentang APBN TA 2018 ditetapkan di paripurna DPR RI.

#### CATATAN

- Melalui Surat Perpustakaan RI Nomor: 2774/1/PRC.03.00/IX.2017 tanggal 5 September 2017 kepada Menkeu RI dan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI perihal usul tambahan anggaran, Perpustakaan RI mengajukan usulan tambahan anggaran TA 2018 sebesar Rp218.203.388.000,- (dua ratus delapan belas miliar dua ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) untuk program pengembangan perpustakaan.
- Melalui Surat Perpustakaan RI Nomor: 2958/1/c/IX.2017 tanggal 26 September 2017 kepada Menkeu RI dan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI perihal usul tambahan anggaran pemusatan langganan *e-resources*, Perpustakaan RI mengajukan usulan tambahan anggaran TA 2018 sebesar Rp182.857.392.000,- (seratus delapan puluh dua miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) untuk pemusatan langganan *e-journal*.

3. Terhadap usulan tambahan untuk program pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada Catatan Nomor 1, Komisi X DPR RI meminta Perpusnas RI agar usulan tersebut diusulkan kembali pada saat pembahasan RAPBN Perubahan TA 2018.
4. Terhadap usulan tambahan untuk pemusatan langganan *e-journal* sebagaimana dimaksud pada Catatan Nomor 2, Komisi X DPR RI dan Perpusnas RI sepakat secara bersama-sama akan mensikronkan dengan program di Kemenristekdikti RI, dan membahas lebih lanjut dengan Dirjen Anggaran Kemenkeu RI serta Menteri PPN/Kepala Bappenas RI pada saat pembahasan RAPBN Perubahan TA 2018.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 17.45 WIB

KEPALA PERPUSNAS RI,



MUH. SYARIF BANDO

KETUA RAPAT,



IR. H.A.R. SUTAN ADIL HENDRA, M.M. (